



Tertelatakat "A", AKUNTANSI, 05/BSK/BAH/111/A/10/06/2014.

Tertelatakat "A", MANAJEMEN, 25/SUBAH/117/A/10/06/2013

Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi

Semester GASAL Tahun Akademik 2018/2019

Nomor : 1042/BAK/IX/2018

Setelah memperhatikan Surat Ketua Program Studi tentang usulan dosen pembimbing skripsi dengan ini Ketua STIE Malangkuçewara Malang menetapkan :

Nama : Drs. EDI SUDIARTO, MM., Ak., CA
 Sebagai : Dosen Pembimbing 1
 Nama : -
 Sebagai : Dosen Pembimbing 2

Untuk mahasiswa berikut

Nama : FAHMA ANGGI KUSUMAWATI
 Nomor Pokok : A.2015.1.33279
 Skripsi yang diajukan
 Bidang Kajian : PERPAJAKAN
 Pokok Bahasan : PERPAJAKAN
 Tempat/Obyek : -
 Judul Skripsi : -

Demikian surat penetapan ini dikeluarkan untuk dilaksanakan dengan sebaiknya. Penetapan ini berlaku sejak dikeluarkan.

Dikeluarkan di : Malang
Pada Tanggal : 23/10/2018
Ketua Program Studi Akuntansi,



Dra. RR. WIDANARNI PUDJIASTUTI, Ak., MSi., CA, CPA
NIK-P.3M : 202/710.246



STIE Malangkuççwara

(Accounting Business Management)

Jl. Terusan Candi Kalasan - Malang Telp. 0341-491813

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI BAB.I s.d BAB. III

BLN/TGL	BAB	PERMASALAHAN	PARAF
Bulan :			
1 November 2018		Konsultasi Judul " Efisiensi, Efektifitas, dan Transparansi Pemungutan Pajak daerah dengan Penggunaan Sistem BPHTB (SIM BPHTB) online di Kab. Madura	ls
Bulan :			
4 Desember 2018		bab Konsultasi RD & Outline	ls
Bulan :			
11 Des 2018		Menyerahkan outline yang sudah fix sama menyerahkan BAB I, II, III	ls
Bulan :			
Bulan :			
Bulan :			

Dosen Pembimbing 1

ls

Dosen Pembimbing 2

Catatan:

Bobot Penilaian skripsi oleh pembimbing sebesar 50% dengan kreteria penilaian:

6. Ide/inovasi penelitian
7. Pemahaman konsep/teori
8. Pemahaman Metodologi
9. Kemampuan Analisis
10. Rutinitas Pembimbingan



Tersertifikasi "A", AKUNTANSI, 056/SK/BAK/11/JAL/03/2014
Tersertifikasi "A", MANAJEMEN, 257/SK/BAK/11/JAL/03/2013

Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi

Semester GASAL Tahun Akademik 2018/2019

Nomor : 1042/BAAK/IX/2018

Setelah memperhatikan Surat Ketua Program Studi tentang usulan dosen pembimbing skripsi dengan ini Ketua STIE Malangkuçewara Malang menetapkan :

Nama : Drs. EDI SUDIARTO, MM., Ak, CA
Sebagai : Dosen Pembimbing 1
Nama : ---
Sebagai : Dosen Pembimbing 2

Untuk mahasiswa berikut

Nama : FAHMA ANGGI KUSUMAWATI
Nomor Pokok : A.2015.1.33279

Skripsi yang diajukan

Bidang Kajian : PERPAJAKAN

Pokok Bahasan : PERPAJAKAN

Tempat/Obyek : BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MADIUN

Judul Skripsi : EFISIENSI, EFEKTIFITAS DAN TRANSPARANSI
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DENGAN
PENGUNAAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
BPHTB (SIMBPHTB) ONLINE DI KABUPATEN MADIUN

Demikian surat penetapan ini dikeluarkan untuk dilaksanakan dengan sebaiknya.
Penetapan ini berlaku sejak dikeluarkan.

Dikeluarkan di : Malang
Pada Tanggal : 11/02/2019
Ketua Program Studi Akuntansi,



Dra. R. WIDANINGRUM PUDIASTUTI, Ak., MSi., CA, CPA
NIK-P.3M : 202.710.246



STIE Malangkuççwara

(Accounting Business Management)

Jl. Terusan Candi Kalasan - Malang Telp. 0341-491813

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI BAB IV s.d. BAB V

BLN/TGL	BAB	PERMASALAHAN	PARAF
		Bulan : Februari	
14-2-2019	Konsul	Bab IV +	[Signature]
16/2/2019	Revisi	Bab Data	[Signature]
		Bulan : Februari	
22-2-2019	Mengumpulkan	BAB IV Ace	[Signature]
25/2/2019	Sembes + Revisi	Tambahkan Flow Chart	[Signature]
		Bulan :	
26/2/2019	Ace	Bab IV + V	[Signature]
		Bulan :	
		Bulan :	
		Bulan :	

Dosen Pembimbing 1

[Signature]

Dosen Pembimbing 2

Catatan:

Bobot Penilaian skripsi oleh pembimbing sebesar 50% dengan kriteria penilaian:

- 6. Ide/inovasi penelitian
- 7. Pemahaman konsep/teori
- 8. Pemahaman Metodologi
- 9. Kemampuan Analisis
- 10. Rutinitas Pembimbingan

Lampiran 1
Daftar Wawancara

A. Wawancara dengan Notaris

Nama narasumber : Dany Ermawan, SH., M.Kn
Jabatan : Notaris

1. Dimulai sejak kapan sosialisasi BPHTB online kepada Notaris dan Staff Notaris di kabupaten Madiun dan apa saja yang dibahas dalam sosialisasi tersebut ?
2. Sistem BPHTB online ini sudah berjalan berapa tahun ?
3. Jelaskan Perbedaan sistem BPHTB ketika masih menggunakan manual dan online seperti apa ?
4. Jelaskan Persamaan sistem BPHTB ketika masih menggunakan manual dan online seperti apa ?
5. Bisa dijelaskan prosedur pengajuan pajak BPHTB manual sampai proses verifikasi di Badan Pendapatan daerah di kabupaten Madiun ?
6. Bisa dijelaskan prosedur pengajuan pajak BPHTB online sampai proses verifikasi di Badan Pendapatan daerah di kabupaten Madiun ?
7. Apakah dari wajib pajak sendiri mempermasalahkan sistem manual maupun online? Berikan alasannya.
8. Dari banyaknya wajib pajak yang mengajukan BPHTB apa yang menjadi penyebab wajib pajak sering complain ?
9. Wajib pajak sering mengajukan keberatan, alasannya kenapa bisa wajib pajak merasa keberatan ?
10. Berikan penjelasan mengenai BPHTB online apakah dari sistem BPHTB ini perlu diperbaiki atau dikembangkan ?
11. Bisa dilihat dari sistem BPHTB online yang telah dibahas apakah sudah bisa dikatakan efisien ? jelaskan.
12. Bisa dilihat dari sistem BPHTB online yang telah dibahas apakah sudah bisa dikatakan efektif ? jelaskan.
13. Bisa dilihat dari sistem BPHTB online yang telah dibahas apakah sudah bisa dikatakan Transparan ? jelaskan.
14. Saran untuk kedepannya bagaimana untuk sistem online ini ?

Lanjutan Lampiran 1

B. Wawancara dengan Pegawai Bappenda

Nama narasumber : Retno
Jabatan : Pegawai Bagian Bappenda

1. Sistem BPHTB online sudah berjalan berapa tahun ?
2. Mengapa adanya usulan mengenai program kerja BPHTB online ?
3. Berapa kali dalam setahun memberikan sosialisasi BPHTB online kepada Notaris dan Staffnya ?
4. Mengapa diadakan sosialisasi secara rutin ? apa yang mendorong dilakukannya itu ?
5. Apa saja yang dibahas dalam sosialisasi online ?
6. Jelaskan Perbedaan sistem BPHTB ketika masih menggunakan manual dan online seperti apa ?
7. Jelaskan Persamaan sistem BPHTB ketika masih menggunakan manual dan online seperti apa ?
8. Jelaskan prosedur dalam melakukan sistem BPHTB online sampai proses verifikasi data ?
9. Jelaskan alur pembayaran di slip BAP ?
10. Kendala-kendala apa saja yang dialami pihak Badan Pendapatan Daerah Madiun mengenai BPHTB online ?
11. Biasanya dari Pihak Notaris itu banyak complain masalah apa saja ? jelaskan
12. Untuk pengajuan BPHTB waris mengapa harus langsung datang dan mengurus ke Badan Pendapatan Daerah Madiun ?
13. Dari sistem BPHTB online yang sudah berjalan ini apakah ada keuntungan yang sangat signifikan dibandingkan dengan sistem yang masih manual ? Data apa saja yang mendukung ?
14. Dilihat dari yang sudah dibahas mengenai BPHTB online, jelaskan apakah BPHTB online sudah bisa dikatakan efisien ?
15. Dilihat dari yang sudah dibahas mengenai BPHTB online, jelaskan apakah BPHTB online sudah bisa dikatakan efektif ?
16. Dilihat dari yang sudah dibahas mengenai BPHTB online, jelaskan apakah BPHTB online sudah bisa dikatakan transparan ?
17. Jelaskan apakah sistem BPHTB online ini perlu dikembangkan lagi apa diperbaiki lagi ?
18. Saran untuk sistem BPHTB online kedepannya seperti apa ?

Lanjutan Lampiran 1

C. Wawancara dengan Pegawai Bappenda

Nama narasumber : Subianto
Jabatan : Pegawai Bagian Bappenda

1. Dari wawancara dengan notaris, turunnya BAP itu sangat lama, faktor apa saja yang membuat itu menjadi lam ?
2. Kendala-kendala apa saja yang terjadi dilapangan ?
3. Bagaimana proses BAP sampai dokumen dikembalikan ke notaris ?
4. Jelaskan jika wajib pajak mengajukan keberatan atas terbitnya BAP ?
5. Perbedaan BPHTB online dengan manual apa saja ?
6. Mengapa BPHTB online begitu sangat penting dan sangat dibutuhkan ?
7. Dilihat dari yang sudah dibahas mengenai BPHTB online, jelaskan apakah BPHTB online sudah bisa dikatakan efisien ?
8. Dilihat dari yang sudah dibahas mengenai BPHTB online, jelaskan apakah BPHTB online sudah bisa dikatakan efektif ?
9. Dilihat dari yang sudah dibahas mengenai BPHTB online, jelaskan apakah BPHTB online sudah bisa dikatakan transparan ?
10. Saran untuk sistem BPHTB online untuk kedepannya seperti apa ?

D. Wawancara dengan Pegawai Bappenda

Nama narasumber : Ari
Jabatan : Pegawai Bappenda

1. Jelaskan kriteria-kriteria mengapa keberatan diterima, diterima sebagian, ditolak ?
2. Biasanya apa saja complain dari wajib pajak yang sangat sering terjadi ?
3. Mengenai BPHTB online, apakah sistem ini sudah sangat membantu banyak ?
4. Mengapa sangat signifikan dalam membantu pengolahan data di Badan Pendapatan Daerah kabupaten Madiun ?
5. Data apa yang bisa menunjukkan bahwa sistem BPHTB online sangat membantu banyak dalam sistem di Badan Pendapatan Daerah Madiun ?
6. Dilihat dari yang sudah dibahas mengenai BPHTB online, jelaskan apakah BPHTB online sudah bisa dikatakan efisien ?
7. Dilihat dari yang sudah dibahas mengenai BPHTB online, jelaskan apakah BPHTB online sudah bisa dikatakan efektif ?
8. Dilihat dari yang sudah dibahas mengenai BPHTB online, jelaskan apakah BPHTB online sudah bisa dikatakan transparan ?
9. Saran kedepannya apa untuk BPHTB online ?

Lampiran 2

LAPORAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MADIUN SETELAH PERUBAHAN ANGGARAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2017 MULAI TANGGAL 3 JANUARI S/D 31 DESEMBER 2017

2017

KODE REKENING	JENIS PUNGUTAN	TARGET TAHUN 2017	PENERIMAAN			%	SISA KURANG (LEBIH)
			BULAN INI	S/D BULAN LALU	S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8
4	PENDAPATAN	1.833.964.312,409,92	102.865.954,790,47	1.655.394.638.658,66	1.759.080.590.949,13	95,86%	75.903.721,459,78
4 1	Pendapatan Asli Daerah	242.926.638.378,92	80.178.923,817,47	161.765.238.962,86	241.944.162,780,13	99,60%	982.375.599,73
4 1 1	Pajak Daerah	49.868.896,700,00	8.002,071,843,00	49.783.660,004,00	56.785.731,847,00	113,87%	15.916.835,147,00
4 1 1 01	Pajak Hotel	87.306.700,00	23.095.000,00	55.055.000,00	78.150.000,00	89,51%	9.156.700,00
4 1 1 01 08	Hotel Melati Dua	87.306.700,00	23.095.000,00	55.055.000,00	78.150.000,00	89,51%	9.156.700,00
4 1 1 02	Pajak Restoran	1.830.000.000,00	395.271.847,00	1.371.739.452,00	1.767.011.299,00	96,56%	62.988.701,00
4 1 1 02 01	Restoran	1.830.000.000,00	395.271.847,00	1.371.739.452,00	1.767.011.299,00	96,56%	62.988.701,00
4 1 1 03	Pajak Hiburan	49.400.000,00	8.955.000,00	42.128.745,00	51.083.745,00	103,41%	(1.683.745,00)
4 1 1 03 02	Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	49.400.000,00	8.955.000,00	42.128.745,00	51.083.745,00	103,41%	(1.683.745,00)
4 1 1 04	Pajak Reklame	400.000.000,00	151.830.496,00	271.502.643,00	423.333.139,00	105,83%	(23.333.139,00)
4 1 1 04 01	Reklame Papan/Bill Board/Vidiotron/Megatron	400.000.000,00	151.830.496,00	271.502.643,00	423.333.139,00	105,83%	(23.333.139,00)
4 1 1 05	Pajak Penerangan Jalan	18.008.890.000,00	1.667.696.991,00	16.671.426.745,00	18.339.123.736,00	101,83%	(330.233.736,00)
4 1 1 05 01	Penerimaan Pajak Penerangan PLN	18.008.890.000,00	1.667.696.991,00	16.671.426.745,00	18.339.123.736,00	101,83%	(330.233.736,00)
4 1 1 06	Pajak Pengambilan Bahan Galian Gol. C	700.000.000,00	122.532.500,00	412.893.750,00	535.426.250,00	76,49%	164.573.750,00
4 1 1 06 04	Batu Kapur	700.000.000,00	122.532.500,00	412.893.750,00	535.426.250,00	76,49%	164.573.750,00
4 1 1 07	Pajak Parkir	84.000.000,00	5.084.800,00	59.244.413,00	64.329.213,00	76,58%	19.670.787,00
4 1 1 07 01	Pajak Parkir	84.000.000,00	5.084.800,00	59.244.413,00	64.329.213,00	76,58%	19.670.787,00
4 1 1 08	Pajak Air Bawah Tanah	282.000.000,00	44.287.842,00	272.639.435,00	316.927.277,00	112,39%	(34.927.277,00)
4 1 1 08 01	Pajak Air Bawah Tanah	282.000.000,00	44.287.842,00	272.639.435,00	316.927.277,00	112,39%	(34.927.277,00)
1 1 1 11	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1 1 1 1 04	Batu Kapur	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

- 2 -

1	2	3	4	5	6	7	8
4 1 1 12	PBB Pedesaan dan Perkotaan	18.877.300.000,00	2.998.547.414,00	16.656.058.990,00	19.654.606.404,00	104,12%	(777.306.404,00)
4 1 1 12 01	PBB Pedesaan dan Perkotaan	18.877.300.000,00	2.998.547.414,00	16.656.058.990,00	19.654.606.404,00	104,12%	(777.306.404,00)
4 1 1 13	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	9.550.000.000,00	2.584.769.953,00	12.970.970.831,00	15.555.740.784,00	162,89%	(6.005.740.784,00)
4 1 1 13 01	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	9.550.000.000,00	2.584.769.953,00	12.970.970.831,00	15.555.740.784,00	162,89%	(6.005.740.784,00)
4 1 2	Retribusi Daerah	33.396.127.750,00	4.595.368.544,00	27.463.287.513,50	32.058.656.057,50	96,00%	1.337.471.632,50
4 1 2 01	Retribusi Jasa Umum	31.728.846.250,00	4.394.138.049,00	25.829.509.758,00	30.223.647.807,00	95,26%	1.505.198.443,00
4 1 2 01 01	Retribusi Pelayanan Kesehatan - Puskesmas	6.141.850.000,00	645.098.800,00	4.941.379.150,00	5.586.477.950,00	90,96%	555.372.050,00
4 1 2 01 05	Retribusi Pelayanan Kesehatan RSUD	18.103.300.000,00	3.043.941.249,00	14.230.601.808,00	17.274.543.057,00	95,42%	828.756.943,00
4 1 2 01 07	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	220.810.250,00	9.705.000,00	211.354.000,00	221.059.000,00	100,20%	(448.750,00)
4 1 2 01 17	Ret. Pelayanan Penguburan/Pemakaman	21.000.000,00	2.760.000,00	17.640.000,00	20.400.000,00	97,14%	600.000,00
4 1 2 01 19	Retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum	4.648.941.000,00	458.600.000,00	4.255.285.000,00	4.713.885.000,00	101,40%	(64.944.000,00)
4 1 2 01 22	Retribusi Pelayanan Pasar - Kios	2.109.725.000,00	183.478.000,00	1.626.914.800,00	1.810.392.800,00	85,81%	299.332.200,00
4 1 2 01 26	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - Mobil Bus - Microbus	480.420.000,00	47.855.000,00	546.035.000,00	593.890.000,00	123,62%	(113.470.000,00)
4 1 2 01 35	Retribusi Alat Penanggulangan Kebakaran	3.000.000,00	2.700.000,00	300.000,00	3.000.000,00	100,00%	0,00
4 1 2 02	Retribusi Jasa Usaha	751.213.500,00	130.968.380,00	649.274.384,00	780.242.764,00	103,86%	(29.029.264,00)
4 1 2 02 01	Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Tanah dan Bangunan	328.815.000,00	88.494.780,00	177.457.867,00	265.952.647,00	80,88%	62.862.353,00
4 1 2 02 02	Pemakaian Kekayaan Daerah - Laboratorium	87.741.500,00	16.652.000,00	109.861.817,00	128.513.817,00	144,19%	(38.772.317,00)
4 1 2 02 05	Retribusi Terminal - Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
4 1 2 02 21	Retribusi Tempat Rekreasi	10.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	50,00%	5.000.000,00
4 1 2 02 22	Retribusi Tempat Pariwisata	143.640.000,00	4.341.600,00	129.599.200,00	133.940.800,00	93,25%	9.699.200,00
4 1 2 02 31	Retribusi Rumah Potong Hewan	56.017.000,00	10.180.000,00	38.290.500,00	48.470.500,00	86,53%	7.546.500,00
4 1 2 02 32	Pemakaian Kekayaan Daerah - Alat Berat/Mesin Gilas	125.000.000,00	11.300.000,00	189.065.000,00	200.365.000,00	160,29%	(75.365.000,00)
4 1 2 03	Retribusi Perizinan Tertentu	916.068.000,00	70.262.115,00	984.503.371,50	1.054.765.486,50	115,14%	(138.697.486,50)
4 1 2 03 01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	745.578.000,00	69.662.115,00	846.599.339,50	916.261.454,50	122,89%	(170.683.454,50)
4 1 2 03 02	Retribusi Izin Gangguan Tempat Usaha/Keg kpd Orang Pribadi	165.000.000,00	0,00	132.624.032,00	132.624.032,00	80,38%	32.375.968,00
4 1 2 03 05	Retribusi Pembelian Izin Trayek kepada Orang Pribadi	5.490.000,00	600.000,00	5.280.000,00	5.880.000,00	107,10%	(390.000,00)

Lampiran 3

LAPORAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MADIUN
SETELAH PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018
MULAI TANGGAL 2 JANUARI S/D 31 DESEMBER 2018

KODE REKENING	JENIS PUNGUTAN	TARGET TAHUN 2018	PENERIMAAN		%	SISA KURANG (LEBIH)
			BULAN INI	S/D BULAN LALU		
1	2	3	4	5	6	7
4	PENDAPATAN	18.819.797.419.215,80	18.749.810.084,52	18.43.572.107.197,18	100,57%	(10.299.498.065,91)
4 1	Pendapatan Asli Daerah	211.675.119.290,80	60.392.497.911,52	158.545.892.750,18	103,21%	(72.133.311.405,91)
4 1 1	Pajak Daerah	58.664.987.900,00	10.877.426.885,93	62.081.124.750,81	107,28%	(4.273.266.546,60)
4 1 1 01	Pajak Hotel	59.985.000,00	18.020.000,00	46.585.000,00	107,70%	(4.620.000,00)
4 1 1 01 06	Hotel Melati Dua	59.985.000,00	18.020.000,00	46.585.000,00	107,70%	(4.620.000,00)
4 1 1 02	Pajak Restoran	2.228.446.000,00	613.963.125,00	1.366.270.427,70	88,86%	248.212.447,30
4 1 1 02 01	Restoran	2.228.446.000,00	613.963.125,00	1.366.270.427,70	88,86%	248.212.447,30
4 1 1 03	Pajak Hiburan	53.856.900,00	10.172.500,00	43.699.000,00	100,03%	(14.600,00)
4 1 1 03 02	Pengukuran Keseluruhan Musik/Tari/Susana	53.856.900,00	10.172.500,00	43.699.000,00	100,03%	(14.600,00)
4 1 1 04	Pajak Reklame	325.000.000,00	122.885.575,00	295.307.191,50	128,67%	(93.192.766,50)
4 1 1 04 01	Forum/Papan/Sil Board/Vidiotron/Megatron	325.000.000,00	122.885.575,00	295.307.191,50	128,67%	(93.192.766,50)
4 1 1 05	Pajak Penerangan Jalan	21.000.000.000,00	1.854.879.866,00	19.341.589.849,00	100,94%	(196.469.715,00)
4 1 1 05 01	Penernaan Pajak Penerangan PLN	21.000.000.000,00	1.854.879.866,00	19.341.589.849,00	100,94%	(196.469.715,00)
4 1 1 06	Pajak Pengambilan Bahan Galian Gol. C	300.000.000,00	38.903.000,00	410.024.540,00	149,54%	(148.927.540,00)
4 1 1 06 04	Satu Kapur	300.000.000,00	38.903.000,00	410.024.540,00	149,54%	(148.927.540,00)
4 1 1 07	Pajak Parkir	63.315.000,00	13.912.150,00	60.043.210,70	116,81%	(10.640.360,70)
4 1 1 07 01	Pajak Parkir	63.315.000,00	13.912.150,00	60.043.210,70	116,81%	(10.640.360,70)
4 1 1 08	Pajak Air Bawah Tanah	300.000.000,00	51.537.014,99	287.712.617,09	113,08%	(39.249.632,08)
4 1 1 08 01	Pajak Air Bawah Tanah	300.000.000,00	51.537.014,99	287.712.617,09	113,08%	(39.249.632,08)

1	2	3	4	5	6	7	8
4 1 1 12	IPBB Pedesaan dan Perkotaan	20.584.385.000,00	5.948.070.521,00	18.085.201.231,62	24.033.271.752,62	116,75%	(3.448.886.752,62)
4 1 1 12 01	IPBB Pedesaan dan Perkotaan	20.584.385.000,00	5.948.070.521,00	18.085.201.231,62	24.033.271.752,62	116,75%	(3.448.886.752,62)
4 1 1 13	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	13.750.000.000,00	2.204.782.934,00	12.124.694.693,00	14.329.477.627,00	104,21%	(579.477.627,00)
4 1 1 13 01	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	13.750.000.000,00	2.204.782.934,00	12.124.694.693,00	14.329.477.627,00	104,21%	(579.477.627,00)
4 1 2	Retribusi Daerah	31.897.673.480,00	4.622.299.398,00	26.183.729.071,02	30.806.028.489,02	96,58%	1.091.645.010,98
4 1 2 01	Retribusi Jasa Umum	30.298.008.000,00	4.414.834.474,00	24.682.482.376,00	29.097.316.850,00	96,04%	1.198.691.150,00
4 1 2 01 01	Retribusi Pelayanan Kesehatan - Puskesmas	641.600.000,00	22.492.800,00	254.732.000,00	277.214.800,00	43,20%	364.454.200,00
4 1 2 01 02	Retribusi Pelayanan Kesehatan RSUD	22.407.750.000,00	3.555.528.214,00	17.880.331.228,00	21.435.659.440,00	95,66%	971.890.560,00
4 1 2 01 03	Retribusi Pelayanan Pengurusan/Pemakaman	221.052.000,00	14.955.000,00	6.831.900,00	14.710.500,00	66,52%	73.341.500,00
4 1 2 01 04	Retribusi Parkir Berlangganan	23.457.000,00	0,00	0,00	6.831.900,00	29,13%	16.625.100,00
4 1 2 01 05	Retribusi Parkir Non Berlangganan	4.683.395.000,00	494.975.000,00	4.289.830.000,00	4.795.605.000,00	102,35%	(110.210.000,00)
4 1 2 01 06	Retribusi Pelayanan Pasar - Kios	117.285.000,00	9.380.000,00	114.620.000,00	123.400.000,00	105,21%	(8.115.000,00)
4 1 2 01 07	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - Mobil Bus - Microbus	1.650.000.000,00	225.219.500,00	1.587.864.550,00	1.813.084.110,00	109,88%	(163.084.110,00)
4 1 2 01 08	Retribusi Alat Penanggulangan Kebakaran	501.400.000,00	19.050.000,00	395.730.000,00	414.780.000,00	82,72%	86.820.000,00
4 1 2 01 09	Retribusi Tera Ulang UTPP	50.000.000,00	73.243.900,00	11.867.200,00	84.831.100,00	169,66%	(34.831.100,00)
4 1 2 02	Retribusi Jasa Usaha	891.470.480,00	121.038.540,00	818.884.787,00	839.833.337,00	105,40%	(48.162.857,00)
4 1 2 02 01	Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Tanah dan Bangunan	300.000.000,00	20.231.240,00	300.524.267,00	320.765.507,00	106,92%	(20.755.507,00)
4 1 2 02 02	Pemakaian Kekayaan Daerah - Laboratorium	110.000.000,00	40.262.000,00	63.500.000,00	133.708.000,00	121,81%	(23.788.000,00)
4 1 2 02 03	Retribusi Tempat Parkir	12.000.000,00	7.150.000,00	4.850.000,00	19.200.000,00	160,00%	23.000.000,00
4 1 2 02 04	Retribusi Rumah Potong Hewan	173.201.480,00	39.020.300,00	111.174.600,00	150.194.900,00	86,89%	23.008.580,00
4 1 2 02 05	Pemakaian Kekayaan Daerah - Alat Berat/Mesin Gilas	59.917.000,00	0,00	13.740.000,00	13.740.000,00	22,85%	42.277.000,00
4 1 2 02 06	Retribusi Sewa Rusunawa	180.192.000,00	14.375.000,00	150.420.000,00	184.705.000,00	85,65%	25.397.000,00
4 1 2 02 07	Retribusi Sewa Rusunawa	50.000.000,00	0,00	144.379.930,00	144.379.930,00	289,76%	(94.379.930,00)
4 1 2 03	Retribusi Partisipan Tertentu	710.195.000,00	86.428.384,00	882.651.998,02	769.078.292,02	108,29%	(58.883.282,02)
4 1 2 03 01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	704.820.000,00	80.208.384,00	680.061.998,02	766.208.292,02	108,72%	(61.478.292,02)
4 1 2 03 02	Retribusi Pembenan Izin Trayak kepada Orang Pribadi	5.375.000,00	220.000,00	2.560.000,00	2.780.000,00	51,72%	2.505.000,00

Lampiran 4



PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
BADAN PENDAPATAN

Jl Alun Alun Timur No 3 , No Telp (0351) 453423
MEJAYAN - KAB MADIUN Kode Pos 63153

LAPORAN HASIL PENELITIAN

NOMOR : 970 /LHP-KEB/2041/402.113/2018

No. SSPD : 351900514.11.2018.7767.123
 No. BAP : 970/351900514.11.2018.7767.123/402.113/2018
 Nama Wajib Pajak : NURUL FAUZIAH
 Alamat Wajib Pajak : KEMULAN
 NOP : 35.19.040.013.006.0034.0
 Jenis Peruntukan : Tanah Darat
 Alamat Objek Pajak : DSN. KEMULAN, MRUWAK, DAGANGAN, KAB. MADIUN
 Desa / Kelurahan : Mruwak
 Kecamatan : Dagangan
 Tanggal BAP : 16-11-2018
 Uraian Permohonan : Pengajuan Keberatan atas BAP BPHTB dengan No Pengajuan Permohonan Keb/BPHTB/2029/2018

Hasil Penelitian :

1. Berdasarkan data pengajuan Wajib Pajak No SSPD 351900514.11.2018.7767.123 diajukan NPOP untuk Dasar Pengenaan Pajak BPHTB sebesar Rp. 499.650.000 (SSPD online yang sudah diisi oleh WP/ Notaris PPAT terlampir)

Perhitungan menurut SPTPD/ SSPD BPHTB

Uraian	Luas (Diisi luas tanah dan atau bangunan yang haknya diperoleh)	NJOP PBB/m2 (Diisi berdasarkan informasi dilokasi/obyek pajak)	Luas x Harga Jual/Nilai Pasar/m2
Tanah (bumi)	3106 m ²	Rp. 48.000	Rp. 149.088.000
Bangunan	100 m ²	Rp. 337.500	Rp. 33.750.000
Total NJOP PBB			Rp. 182.838.000
Nilai Transaksi			Rp. 499.650.000

2. Sedangkan penghitungan BAP No 970/351900514.11.2018.7767.123/402.113/2018 atas hasil penelitian administrasi dan/ Lapangan dihasilkan NPOP BPHTB Perhitungan Menurut Hasil Verifikasi Administrasi/ Lapangan

Uraian	Luas (Diisi luas tanah dan atau bangunan yang haknya diperoleh)	NJOP PBB/m2 (Diisi berdasarkan Informasi dilokasi/obyek pajak)	Luas x Harga Jual/Nilai Pasar/m2
Tanah (bumi)	3106 m ²	Rp. 200.000	Rp. 621.200.000
Bangunan	100 m ²	Rp. 337.500	Rp. 33.750.000
NPOP/Nilai Pasar			Rp. 654.950.000

3. Pengajuan Permohonan Keberatan Wajib Pajak dengan No Surat Keb/BPHTB/2029/2018 Menyatakan bahwa atas BAP tersebut adalah salah / tidak sesuai dengan nilai transaksi/ pasar sesungguhnya dikarenakan dikarenakan harga permeter tanah tersebut sesuai harga jual beli adalah Rp. 100.000/permeter

Lanjutan Lampiran 4

Dan nilai transaksi / pasar yang benar menurut wajib pajak adalah

Uraian	Luas (Diisi luas tanah dan atau bangunan yang haknya diperoleh)	NJOP PBB/m ² (Diisi berdasarkan informasi dilokasi/obyek pajak)	Luas x Harga Jual/Nilai Pasar/m ²
Tanah (bumi)	3106 m ²	Rp. 100.000	Rp. 310.600.000
Bangunan	100 m ²	Rp. 337.500	Rp. 33.750.000
NPOP/Nilai Pasar			Rp. 344.350.000

4. Atas pengajuan keberatan tersebut telah dilakukan verifikasi ulang baik administrasi maupun di lapangan dan berdasarkan fakta/novum yang ada yaitu

- harga sudah disesuaikan dengan harga pasar
-
-

Penghitungan NPOP BPHBT menjadi

Uraian	Luas (m ²)	Harga Wajar (m ²)	Luas x Harga Jual/Nilai Pasar/m ²
Tanah (bumi)	3106 m ²	Rp. 150.000	Rp. 465.900.000
Bangunan	100 m ²	Rp. 337.500	Rp. 33.750.000
NPOP/Nilai Pasar			Rp. 499.650.000

Kesimpulan :

Maka atas fakta tersebut diatas, pengajuan permohonan keberatan sebagaimana diatas dapat diterima :

Sebagian
 Diterima Seluruhnya
 Ditolak

Dan Penghitungan NPOP BPHTB menjadi

Uraian	Luas (m ²)	Harga Wajar (m ²)	Luas x Harga Jual/Nilai Pasar/m ²
Tanah (bumi)	3106 m ²	Rp. 150.000	Rp. 465.900.000
Bangunan	100 m ²	Rp.337.500	Rp. 33.750.000
NPOP/Nilai Pasar			Rp. 499.650.000

Perhitungan BPHTB Terutang :

Nilai Perolehan : Rp. 499.650.000
 NPOPTKP : Rp. 60.000.000
 NPOPKP : Rp. 439.650.000
 BPHTB Terutang : Rp. 21.982.500

Mengetahui dan mengesahkan
 Kepala Bidang Pembukuan dan Penagihan

Sub Bidang Keberatan dan Verifikasi

ARI NURSURAHMAT, S.Sos
 NIP. 19721029 199803 1 006

PENTA LIANAWATI, SE, M.Si
 NIP. 19700321 200312 2 004

Lanjutan Lampiran 4

Madiun, 28-11-2018

No Surat : Keb/BPHTB/2029/2018
Perihal : Permohonan Keberatan

Kepada
Yth. Kepada Badan Pendapatan
di Madiun

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah diterbitkannya BAP dengan Nomor SSPD BPHTB 351900514.11.2018.7767.123 atas pengajuan dengan

Nama Wajib Pajak : NURUL FAUZIAH
Alamat Wajib Pajak : KEMULAN
NOP : 35.19.040.013.006.0034.0

dengan hasil verifikasi NPOP sebesar Rp 654.950.000

Dengan ini saya mengajukan permohonan keberatan atas BAP tersebut dikarenakan dikarenakan harga permeter tanah tersebut sesuai harga jual beli adalah Rp. 100.000/permeter

Sebagai bahan pertimbangan saya lampirkan bukti pendukung sebagaimana berikut
upload Kuitansi
upload Surat Keterangan Jual Beli dari Desa ber materai


Dan penghitungan NPOP yang menurut kami benar dan riil adalah

Uraian	Luas	Harga /m2	Luas x Harga /m2
Tanah	3106 m ²	Rp. 100.000	Rp. 310.600.000
Bangunan	100 m ²	Rp. 337.500	Rp. 33.750.000
NPOP			Rp. 344.350.000

Madiun, 28-11-2018
Hormat Saya,
PEMOHON

NURUL FAUZIAH

Lampiran 5



**SURAT SETORAN PAJAK DAERAH
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
(SSPD - BPHTB)**

**BERFUNGSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHAUAN OBJEK PAJAK
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SPOP PBB)**

Rekening Bank Jatim
No. 0051032011

Lembar 1
Untuk Wajib Pajak

BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA MADIUN
PERHATIAN : Bacalah petunjuk pengisian pada halaman belakang, lembar ini terlebih dahulu.

A.

1. Nama Wajib Pajak :

2. NPWP :

3. Alamat Wajib Pajak :

4. Kelurahan : 5. RT / RW : 6. Kecamatan :

7. Kota : 8. Kode Pos :

B.

1. Nomor Objek Pajak (NOP) PBB :

2. Letak tanah dan atau bangunan :

3. Kelurahan : 4. RT / RW :

5. Kecamatan : 6. Kota :

Penghitungan NJOP PBB :

Uraian	Luas (Diisi luas tanah dan atau bangunan yang hanya diperoleh)	m ²	NJOP PBB / M ² (Diisi berdasarkan SPPT PBB tahun terjadinya perolehan hak / tahun)	Rp.	Luas x NJOP PBB / M ²	Rp.
Tanah (Bumi)	7	<input type="text"/>	9	<input type="text"/>	11	<input type="text"/>
Bangunan	8	<input type="text"/>	10	<input type="text"/>	12	<input type="text"/>
NJOP					13	<input type="text"/>

15. Jenis Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan 14. Harga transaksi / Nilai Pasar : Rp.

16. Nomor Serifikat

C. AKUMULASI NILAI PEROLEHAN HAK SEBELUMNYA Rp.

D. PENGHITUNGAN BPHTB (Hanya diisi berdasarkan penghitungan Wajib Pajak)

1. Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) memperhatikan nilai pada B.13, B.14 dan C	1	Rp.
2. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) memperhatikan nilai pada C	2	Rp.
3. Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOP KP)	3	Rp.
4. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang	4	Rp.

E. Jumlah Setoran berdasarkan :

a. Penghitungan Wajib Pajak

b. STPD BPHTB / SKPDB KURANG BAYAR / SKPDB KURANG BAYAR TAMBAHAN *) Nomor : Tanggal :

c. Pengurangan dihitung sendiri menjadi % berdasar Peraturan KDH No.

d.

JUMLAH YANG DISETOR (dengan angka) (dengan huruf)

Rp.

) Coret yang tidak perlu


tgl. WAJIB PAJAK / PENYETOR <small>Nama lengkap dan tanda tangan</small>	MENGETAHUI PPT / Kantor Pertanahan / Kantor Lelang <small>Nama lengkap, tempat dan tanda tangan</small>	DITERIMA OLEH TEMPAT PEMBAYARAN BPHTB Tanggal <small>Nama lengkap tempat dan tanda tangan</small>	Telah diverifikasi BADAN PENDAPATAN DAERAH <small>Nama lengkap tempat dan tanda tangan</small>
--	--	--	--

Hanya diisi oleh Petugas Bapenda Nomor Dokumen :

NOP PBB baru :

Lanjutan Lampiran 5

PETUNJUK PENGISIAN SSPD BPHTB



**SURAT SETORAN PAJAK DAERAH
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
(SSPD - BPHTB)**

BERFUNGSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SPOP PBB)

Rekening Bank Jatim
No. 0051032811

Lembar 2
Untuk Bapenda
melalui Bank tempat
Pembayaran

BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA MADIUN
PERHATIAN : Bacalah petunjuk pengisian pada halaman belakang, lembar ini terlebih dahulu

A. 1. Nama Wajib Pajak :

2. NPWP :

3. Alamat Wajib Pajak :

4. Kelurahan : 5. RT / RW : 6. Kecamatan :

7. Kola : 8. Kode Pos :

B. 1. Nomor Objek Pajak (NOP) PBB :

2. Lelak tanah dan atau bangunan :

3. Kelurahan : 4. RT / RW :

5. Kecamatan : 6. Kota :

Penghitungan NJOP PBB :

Uraian	Luas (Diisi luas tanah dan atau bangunan yang hanya diperalah)	Luas	NJOP PBB / M ² (Diisi berdasarkan SPOP PBB tahun terjadinya perolehan hak / Tahun	Luas x NJOP PBB / M ²
Tanah (Bumi)	7 m ²	9 Rp.	11 Rp. angka 7 x angka 9
Bangunan	8 m ²	10 Rp.	12 Rp. angka 8 x angka 10
NJOP				13 Rp. angka 11 + angka 12

15. Jenis Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan 14. Harga transaksi / Nilai Pasar :

16. Nomor Sertifikat

C. AKUMULASI NILAI PEROLEHAN HAK SEBELUMNYA Rp.

D. PENGHITUNGAN BPHTB (Hanya diisi berdasarkan penghitungan Wajib Pajak)

1. Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) memperhatikan nilai pada B.13, B.14 dan C	1	Rp.
2. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) memperhatikan nilai pada C	2	Rp.
3. Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP)	3	Rp.
4. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang	4	Rp.

E. Jumlah Setoran berdasarkan :

a. Penghitungan Wajib Pajak

b. STPD BPHTB / SKPDB KURANG BAYAR / SKPDB KURANG BAYAR TAMBAHAN *) Nomor : Tanggal :

c. Pengurangan dihitung sendiri menjadi % berdasar Peraturan KDH No.

d.

JUMLAH YANG DISETOR (dengan angka) (dengan huruf)

Rp.

*) Coret yang tidak perlu

....., tgl. WAJIB PAJAK / PENYETOR	MENGETAHUI PPAT / Kantor Perlanahan / Kantor Lelang	DITERIMA OLEH TEMPAT PEMBAYARAN BPHTB Tanggal	Telah diverifikasi BADAN PENDAPATAN DAERAH
Nama lengkap dan tanda tangan	Nama lengkap tempat dan tanda tangan	Nama lengkap tempat dan tanda tangan	Nama lengkap tempat dan tanda tangan

Hanya diisi oleh Petugas Bapenda

Nomor Dokumen :

NOP PBB baru :

Lanjutan Lampiran 5

BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA MADIUN
PERHATIAN : Bacalah petunjuk pengisian pada halaman belakang, lembar ini terlebih dahulu

A. 1. Nama Wajib Pajak :

2. NPWP :

3. Alamat Wajib Pajak :

4. Kelurahan : 5. RT / RW : 6. Kecamatan :

7. Kota : 8. Kode Pos :

B. 1. Nomor Objek Pajak (NOP) PBB :

2. Letak tanah dan atau bangunan :

3. Kelurahan : 4. RT / RW :

5. Kecamatan : 6. Kota :

Penghitungan NJOP PBB :

Uraian	Luas (Diisi luas tanah dan atau bangunan yang hanya diperoleh)	m ²	NJOP PBB / M ² (Diisi berdasarkan SPPT PBB tahun terjadinya perolehan hak / Tahun	Rp.	Luas x NJOP PBB / M ²
Tanah (Bumi)	7	9	Rp.	11 Rp. <small>angka 7 x angka 9</small>
Bangunan	8	10	Rp.	12 Rp. <small>angka 8 x angka 10</small>
NJOP					13 Rp. <small>angka 11 + angka 12</small>

15. Jenis Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan 14. Harga transaksi / Nilai Pasar :

16. Nomor Sertifikat

C. AKUMULASI NILAI PEROLEHAN HAK SEBELUMNYA Rp.

D. PENGHITUNGAN BPHTB (Hanya diisi berdasarkan penghitungan Wajib Pajak)

1. Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) <i>memperhatikan nilai pada B.13, B. 14 dan C</i>	1	▶ Rp.
2. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak(NPOPTKP) <i>memperhatikan nilai pada C</i>	2	▶ Rp.
3. Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak(NPOPKP) <small>Angka 1 - angka 2</small>	3	▶ Rp.
4. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang <small>5% x angka 3</small>	4	▶ Rp.

E. Jumlah Setoran berdasarkan :

a. Penghitungan Wajib Pajak

b. STPD BPHTB / SKPDB KURANG BAYAR / SKPDB KURANG BAYAR TAMBAHAN *) Nomor : Tanggal :

c. Pengurangan dihitung sendiri menjadi % berdasar Peraturan KDH No.

d.


JUMLAH YANG DISETOR (dengan angka) (dengan huruf)

Rp.


*) Coret yang tidak perlu

MENGETAHUI DITERIMA OLEH Telah diverifikasi

Lanjutan Lampiran 5

	SURAT SETORAN PAJAK DAERAH BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (SSPD - BPHTB)	Rekening Bank Jatim No. 0051032811 Lembar 4 Untuk Bank Tempat Pembayaran																																
BERFUNGSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SPOP PBB)																																		
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA MADIUN PERHATIAN : Bacalah petunjuk pengisian pada halaman belakang, lembar ini terlebih dahulu																																		
A. 1. Nama Wajib Pajak : <input type="text"/> 2. NPWP : <input type="text"/> 3. Alamat Wajib Pajak : <input type="text"/> 4. Kelurahan : <input type="text"/> 5. RT / RW : <input type="text"/> 6. Kecamatan : <input type="text"/> 7. Kota : <input type="text"/> 8. Kode Pos : <input type="text"/>																																		
B. 1. Nomor Objek Pajak (NOP) PBB : <input type="text"/> 2. Letak tanah dan atau bangunan : <input type="text"/> 3. Kelurahan : <input type="text"/> 4. RT / RW : <input type="text"/> 5. Kecamatan : <input type="text"/> 6. Kota : <input type="text"/>																																		
Penghitungan NJOP PBB : <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Uraian</th> <th style="width: 10%;">Luas (Diisi luas tanah dan atau bangunan yang hanya diperoleh)</th> <th style="width: 10%;">m²</th> <th style="width: 10%;">9</th> <th style="width: 10%;">Rp.</th> <th style="width: 10%;">11</th> <th style="width: 10%;">Rp.</th> <th style="width: 10%;">angka 7 x angka 9</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tanah (Bumi)</td> <td>7</td> <td>.....</td> <td>9</td> <td>Rp.</td> <td>11</td> <td>Rp.</td> <td>angka 7 x angka 9</td> </tr> <tr> <td>Bangunan</td> <td>8</td> <td>.....</td> <td>10</td> <td>Rp.</td> <td>12</td> <td>Rp.</td> <td>angka 8 x angka 10</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td style="text-align: right;">NJOP</td> <td>13</td> <td>Rp.</td> <td>angka 11 + angka 12</td> </tr> </tbody> </table>			Uraian	Luas (Diisi luas tanah dan atau bangunan yang hanya diperoleh)	m ²	9	Rp.	11	Rp.	angka 7 x angka 9	Tanah (Bumi)	7	9	Rp.	11	Rp.	angka 7 x angka 9	Bangunan	8	10	Rp.	12	Rp.	angka 8 x angka 10					NJOP	13	Rp.	angka 11 + angka 12
Uraian	Luas (Diisi luas tanah dan atau bangunan yang hanya diperoleh)	m ²	9	Rp.	11	Rp.	angka 7 x angka 9																											
Tanah (Bumi)	7	9	Rp.	11	Rp.	angka 7 x angka 9																											
Bangunan	8	10	Rp.	12	Rp.	angka 8 x angka 10																											
				NJOP	13	Rp.	angka 11 + angka 12																											
15. Jenis Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan <input type="text"/> 14. Harga transaksi / Nilai Pasar : <input type="text"/> Rp.																																		
16. Nomor Sertifikat <input type="text"/> Rp.																																		
C. AKUMULASI NILAI PEROLEHAN HAK SEBELUMNYA																																		
D. PENGHITUNGAN BPHTB (Hanya diisi berdasarkan penghitungan Wajib Pajak)																																		
1. Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) memperhatikan nilai pada B. 13, B. 14 dan C		1 ▶ Rp.																																
2. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) memperhatikan nilai pada C		2 ▶ Rp.																																
3. Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP) Angka 1 - angka 2		3 ▶ Rp.																																
4. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang 5% x angka 3		4 ▶ Rp.																																
E. Jumlah Setoran berdasarkan :																																		
<input type="checkbox"/> a. Penghitungan Wajib Pajak																																		
<input type="checkbox"/> b. STPD BPHTB / SKPDB KURANG BAYAR / SKPDB KURANG BAYAR TAMBAHAN *																																		
<input type="checkbox"/> c. Pengurangan dihitung sendiri menjadi <input type="text"/> % berdasar Peraturan KDH No.																																		
<input type="checkbox"/> d.																																		
JUMLAH YANG DISETOR (dengan angka) (dengan huruf)																																		
Rp. <input type="text"/>																																		
*) Coret yang tidak perlu																																		
tgl. WAJIB PAJAK / PENYETOR	MENGETAHUI PPAT / Kantor Pertanahan / Kantor Lelang	DITERIMA OLEH TEMPAT PEMBAYARAN BPHTB Tanggal																																
Nama lengkap dan tanda tangan	Nama lengkap stempel dan tanda tangan	Nama lengkap stempel dan tanda tangan																																
Hanya diisi oleh Petugas Bapenda																																		
Nomor Dokumen : <input type="text"/> NOP PBB baru : <input type="text"/>																																		
SR Madiun																																		

Lanjutan Lampiran 5

	<p>SURAT SETORAN PAJAK DAERAH BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (SSPD - BPHTB)</p>	Rekening Bank Jatim No. 0051032811 Lembar 5 Untuk PPAT/Notaris/ Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang / Kantor Pertanahan																
<p>BERFUNGSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SPOP PBB)</p>																		
<p>BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA MADIUN PERHATIAN : Bacalah petunjuk pengisian pada halaman belakang, lembar ini terlebih dahulu</p>																		
<p>A. 1. Nama Wajib Pajak : <input style="width: 600px;" type="text"/></p> <p>2. NPWP : <input style="width: 200px;" type="text"/></p> <p>3. Alamat Wajib Pajak : <input style="width: 600px;" type="text"/></p> <p>4. Kelurahan : <input style="width: 150px;" type="text"/> 5. RT / RW : <input style="width: 150px;" type="text"/> 6. Kecamatan : <input style="width: 150px;" type="text"/></p> <p>7. Kota : <input style="width: 150px;" type="text"/> 8. Kode Pos : <input style="width: 100px;" type="text"/></p>																		
<p>B. 1. Nomor Objek Pajak (NOP) PBB : <input style="width: 200px;" type="text"/></p> <p>2. Letak tanah dan atau bangunan : <input style="width: 600px;" type="text"/></p> <p>3. Kelurahan : <input style="width: 150px;" type="text"/> 4. RT / RW : <input style="width: 150px;" type="text"/></p> <p>5. Kecamatan : <input style="width: 150px;" type="text"/> 6. Kota : <input style="width: 150px;" type="text"/></p> <p>Penghitungan NJOP PBB :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: x-small;"> <thead> <tr> <th>Uraian</th> <th>Luas (Diisi luas tanah dan atau bangunan yang hanya diperoleh)</th> <th>NJOP PBB / M² (Diisi berdasarkan SPPPT PBB tahun terdanya perolehan hak / Tahun</th> <th>Luas x NJOP PBB / M²</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tanah (Bumi)</td> <td>7 <input style="width: 100px;" type="text"/> m²</td> <td>9 Rp.</td> <td>11 Rp. <small>angka 7 x angka 9</small></td> </tr> <tr> <td>Bangunan</td> <td>8 <input style="width: 100px;" type="text"/> m²</td> <td>10 Rp.</td> <td>12 Rp. <small>angka 8 x angka 10</small></td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;">NJOP</td> <td>13 Rp. <small>angka 1 + angka 12</small></td> </tr> </tbody> </table> <p>15. Jenis Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan <input style="width: 50px;" type="text"/> 14. Harga transaksi / Nilai Pasar : Rp. <input style="width: 200px;" type="text"/></p> <p>16. Nomor Sertifikat <input style="width: 100px;" type="text"/></p>			Uraian	Luas (Diisi luas tanah dan atau bangunan yang hanya diperoleh)	NJOP PBB / M ² (Diisi berdasarkan SPPPT PBB tahun terdanya perolehan hak / Tahun	Luas x NJOP PBB / M ²	Tanah (Bumi)	7 <input style="width: 100px;" type="text"/> m ²	9 Rp.	11 Rp. <small>angka 7 x angka 9</small>	Bangunan	8 <input style="width: 100px;" type="text"/> m ²	10 Rp.	12 Rp. <small>angka 8 x angka 10</small>	NJOP			13 Rp. <small>angka 1 + angka 12</small>
Uraian	Luas (Diisi luas tanah dan atau bangunan yang hanya diperoleh)	NJOP PBB / M ² (Diisi berdasarkan SPPPT PBB tahun terdanya perolehan hak / Tahun	Luas x NJOP PBB / M ²															
Tanah (Bumi)	7 <input style="width: 100px;" type="text"/> m ²	9 Rp.	11 Rp. <small>angka 7 x angka 9</small>															
Bangunan	8 <input style="width: 100px;" type="text"/> m ²	10 Rp.	12 Rp. <small>angka 8 x angka 10</small>															
NJOP			13 Rp. <small>angka 1 + angka 12</small>															
<p>C. AKUMULASI NILAI PEROLEHAN HAK SEBELUMNYA Rp. <input style="width: 100px;" type="text"/></p>																		
<p>D. PENGHITUNGAN BPHTB (Hanya diisi berdasarkan penghitungan Wajib Pajak)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>1. Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) memperhatikan nilai pada B.13, B.14 dan C</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">▶ Rp.</td> </tr> <tr> <td>2. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) memperhatikan nilai pada C</td> <td style="text-align: right;">2</td> <td style="text-align: right;">▶ Rp.</td> </tr> <tr> <td>3. Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP) <small>Angka 1 - angka 2</small></td> <td style="text-align: right;">3</td> <td style="text-align: right;">▶ Rp.</td> </tr> <tr> <td>4. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang <small>5% x angka 3</small></td> <td style="text-align: right;">4</td> <td style="text-align: right;">▶ Rp.</td> </tr> </table>			1. Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) memperhatikan nilai pada B.13, B.14 dan C	1	▶ Rp.	2. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) memperhatikan nilai pada C	2	▶ Rp.	3. Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP) <small>Angka 1 - angka 2</small>	3	▶ Rp.	4. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang <small>5% x angka 3</small>	4	▶ Rp.				
1. Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) memperhatikan nilai pada B.13, B.14 dan C	1	▶ Rp.																
2. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) memperhatikan nilai pada C	2	▶ Rp.																
3. Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP) <small>Angka 1 - angka 2</small>	3	▶ Rp.																
4. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang <small>5% x angka 3</small>	4	▶ Rp.																
<p>E. Jumlah Setoran berdasarkan :</p> <p><input type="checkbox"/> a. Penghitungan Wajib Pajak</p> <p><input type="checkbox"/> b. STPD BPHTB / SKPDB KURANG BAYAR / SKPDB KURANG BAYAR TAMBAHAN *) Nomor : <input style="width: 50px;" type="text"/> Tanggal : <input style="width: 50px;" type="text"/></p> <p><input type="checkbox"/> c. Pengurangan dihitung sendiri menjadi <input style="width: 50px;" type="text"/> % berdasar Peraturan KDH No.</p> <p><input type="checkbox"/> d.</p> <p>JUMLAH YANG DISETOR (dengan angka) (dengan huruf)</p> <p>Rp. <input style="width: 200px;" type="text"/> <input style="width: 200px;" type="text"/></p> <p><small>*) Coret yang tidak perlu</small></p>																		
tgl. WAJIB PAJAK / PENYETOR <small>Nama lengkap dan tanda tangan</small>	MENGETAHUI PPAT / Kantor Pertanahan / Kantor Lelang <small>Nama lengkap stempel dan tanda tangan</small>	DITERIMA OLEH TEMPAT PEMBAYARAN BPHTB Tanggal																
Telah diverifikasi BADAN PENDAPATAN DAERAH <small>Nama lengkap stempel dan tanda tangan</small>	Nomor Dokumen : <input style="width: 100px;" type="text"/> NOP PBB baru : <input style="width: 100px;" type="text"/>																	
<p><small>Hanya diisi oleh Petugas Bapenda</small></p>																		

Lanjutan Lampiran 5

SETORAN PAJAK DAERAH
PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
(SSPD-BPHTB)

Lembar 6
Untuk Bendahara Penerimaan

BERFUNGSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBYEK PAJAK
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SPOP PBB)

DAERAH KABUPATEN MADIUN

unjuk pengisian pada halaman belakang lembar ini terlebih dahulu

Jenis Objek Pajak: Tanah Bangunan Tanah dan Bangunan

Alamat: JL. PARDEGA PLANI

5. RT/RW: 007/002 6. Kecamatan: PLANI

7. Kode Pos: 01150

8. Kabupaten Kota: MADIUN

4. RT/RW: MADIUN

Uraian	Luas bangunan yang haknya diperoleh (Diisi luas tanah dan atau bangunan yang diperoleh) m ²	NJOB PBB / m ² (Diisi berdasarkan SPPT PBB tahun terjadinya perolehan hak / Tahun	Luas x NJOP PBB / m ²
7	70	Rp. 27.000	Rp. 1.890.000 (angka 7 x angka 9)
8	26	Rp. 1.950.000	Rp. 70.200.000 (angka 8 x angka 10)
9			Rp. 72.090.000 (angka 11 + angka 12)
10			Rp. 150.000.000

14. Harga transaksi / Nilai pasar: Rp.

NJOB PBB: Rp.

atau bangunan: Tanah Bangunan

Lampiran 6

DATA REFERENSI HARGA WAJAR - NOP : 35.19.130.011.011

Jumlah Data : 71

No.	NOP	Nama	Tahun	Jenis Peruntukan	Lokasi Objek Pajak	Harga Tanah / Meter	Bangunan / Meter
1	35.19.130.011.011.0102.0	rini hartanti	2017	-	Perumahan, DK KUWEK, TIRON MADIUN	824,000.00	2,000,000.00
2	35.19.130.011.011.0102.0	THOPAN WIBAWA, S.PD	2017	-	PERUM. TIRON INDAH	824,000.00	2,000,000.00
3	35.19.130.011.011.0102.0	MOHAMAD CHOIRUL SALEH	2017	-	PERUM. TIRON INDAH	824,000.00	2,000,000.00
4	35.19.130.011.011.0102.0	KUSTANTIYAH	2017	-	PERUM. TIRON INDAH	824,000.00	2,000,000.00
5	35.19.130.011.011.0102.0	PUTRI BUANA	2017	-	PERUM. TIRON INDAH	824,000.00	2,000,000.00
6	35.19.130.011.011.0102.0	ARBA'I MAKMUN MAKSUD	2017	-	Perum Tiron Indah	824,000.00	2,000,000.00
7	35.19.130.011.011.0102.0	NURSIGIT	2017	-	Perum Tiron Indah	824,000.00	2,000,000.00
8	35.19.130.011.011.0102.0	NURSIGIT	2017	-	PERUM TIRON INDAH	824,000.00	2,000,000.00
9	35.19.130.011.011.0102.0	SRI UTAMI	2017	-	PERUM TIRON INDAH	824,000.00	2,000,000.00
10	35.19.130.011.011.0102.0	WIDIYA WIDOWATI	2017	-	PERUM TIRON INDAH	824,000.00	2,000,000.00
11	35.19.130.011.011.0069.0	LINA SUCI INDARWATI	2017	-	Jl Karya Bakti Ds.Tiron Kec.Madiun Kab.Madiun	350,000.00	600,000.00
12	35.19.130.011.011.0102.0	INDRA SUCI	2017	-	PERUM GRIYA TIRON INDAH	900,000.00	2,000,000.00
13	35.19.130.011.011.0070.0	LINA SUCI INDARWATI	2017	-	Jl Karya Bakti Ds.Tiron Kec.Madiun Kab.Madiun	350,000.00	-
14	35.19.130.011.011.0102.0	LELY HERNAWATIK	2017	-	PERUM GRIYA TIRON INDAH	824,000.00	2,000,000.00
15	35.19.130.011.011.0070.0	YAYUK SUSILOWATI	2017	-	Tanah Darat, Jl Karya Bakti, DS. TIRON, KEC. MADIUN, Kab. Madiun	350,000.00	-
16	35.19.130.011.011.0070.0	YAYUK SUSILOWATI	2017	-	Jl. Karya Bakti, Ds. Tiron, Kec. Tiron, Kab. Madiun	350,000.00	-
17	35.19.130.011.011.0119.0	NANDA ARWINTO	2017	-	PERUMAHAN JL. KH HASIM ASHARI		
18	35.19.130.011.011.0119.0	NANDA ARWINTO	2017	-	Jl. KH HASIM ASHARI	1,000,000.00	1,950,000.00
19	35.19.130.011.011.0103.0	BAMBANG ISWADI, Amd	2017	-	Tanah Darat, Jl Gajah Soreng Pati	1,634,000.00	-
20	35.19.130.011.011.0119.0	YUWITA LINDA MARWANTI	2017	-	Jl. KH HASIM ASHARI	1,000,000.00	1,950,000.00
21	35.19.130.011.011.0065.0	SUPARNI, CS	2017	-	Tanah Darat, Jl.Karya Bakti, Ds. Tiron, Kec. Madiun, Kab. Madiun	200,000.00	-
22	35.19.130.011.011.0064.0	SUPARNI, CS	2017	-	Jl. KH Hasim Ashari, Ds.Tiron, Kec. Madiun, Kab. Madiun	200,000.00	243,000.00
23	35.19.130.011.011.0119.0	IIN MAYASARI	2018	Tanah + Bangunan	JL KH HASIM ASHARI KELURAHAN TIRON KECAMATAN N	700,000.00	1,900,000.00
24	35.19.130.011.011.0119.0	SUYATI	2018	Tanah + Bangunan	JL KH HASIM ASHARI KELURAHAN TIRON KECAMATAN N	700,000.00	1,900,000.00
25	35.19.130.011.011.0119.0	RIZAL BAGAS PRAKOSA	2018	Tanah + Bangunan	JL KH HASIM ASHARI KELURAHAN TIRON KECAMATAN N	700,000.00	1,900,000.00
26	35.19.130.011.011.0119.0	YATMI DWI LESTARI	2018	Tanah + Bangunan	JL KH HASIM ASHARI KEL. TIRON KEC. MADIUN	700,000.00	1,900,000.00
27	35.19.130.011.011.0119.0	SRI UTAMI	2018	Tanah + Bangunan	JL KH HASIM ASHARI KELURAHAN TIRON KECAMATAN N	700,000.00	1,900,000.00
28	35.19.130.011.011.0119.0	TITIK ROHANDAYANI SUPRIHATI	2018	Tanah + Bangunan	JL.KH HASIM ASHARI KEL.TIRON KEC.MADIUN	700,000.00	1,900,000.00

Lampiran 7
Berita Acara Penelitian (BAP)

BERITA ACARA PENELITIAN ADMINISTRASI/ LAPANGAN
NOMOR : 970/351900514.11.2018.7759.123/402.113/2018

Jenis Perolehan : 02 - Jual Beli
 Nama Wajib Pajak : NUR AHMADI
 Jenis Peruntukan : Tanah Darat
 Alamat Wajib Pajak : DSN MAWATSARI
 NOP : 35.19.040.015.023.0151.0
 Alamat Obyek Pajak : PERSIL D. 110
 Desa / Kelurahan : Banjarsari Kulon
 Kecamatan : Dagangan
 Tanggal Verifikasi : 14-11-2018

Perhitungan menurut SPTPD/ SSPD BPHTB

Uraian	Luas (Diisi luas tanah dan atau bangunan yang haknya diperoleh)	NJOP PBB/m2 (Diisi berdasarkan SPPT PBB tahun terjadinya perolehan hak/tahun)	Luas x NJOP PBB/m2
Tanah (bumi)	397 m ²	Rp. 27.000	Rp. 10.719.000
Bangunan	0 m ²	Rp. 0	Rp. 0
Total NJOP PBB			Rp. 10.719.000
Nilai Transaksi			Rp. 79.400.000

Perhitungan Menurut Hasil Verifikasi Administrasi/ Lapangan

Uraian	Luas (Diisi luas tanah dan atau bangunan yang haknya diperoleh)	NJOP PBB/m2 (Diisi berdasarkan informasi dilokasi/obyek pajak)	Luas x Harga Jual/Nilai Pasar/m2
Tanah (bumi)	397 m ²	Rp. 250.000	Rp. 99.250.000
Bangunan	0 m ²	Rp. 0	Rp. 0
NPOP/Nilai Pasar			Rp. 99.250.000

Perhitungan BPHTB Terutang

Nilai Perolehan : Rp. 99.250.000
 NPOPTKP : Rp. 80.000.000
 NPOPKP : Rp. 39.250.000
 BPHTB Terutang : Rp. 1.962.500
 Kesimpulan :
 1. NPOP sudah disesuaikan dengan harga transaksi / harga pasar,
 sehingga BPHTB Normal
 2. Berdasarkan estimasi harga wajar tanah yang berlaku
 di object tersebut

Mengetahui dan mengesahkan

Kepala Bidang Pengembangan dan Penetapan

Sub Bidang Pendataan, Pendaftaran dan
Penetapan

ARI NURSURAHMAT. S.Sos (PIt)
NIP. 19721029 199803 1 006

SUBIANTO
NIP. 19620801 198503 1 013